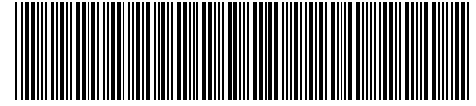




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.672854/2025**



DS:4011-2000-0385-6706

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
  2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
  3. Provinsi : (21) MALUKU
  4. Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
- Sebesar : Rp. 12.282.785.000 ( DUA BELAS MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN  
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	12.282.785.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAUMLAKI (104) Rp. 12.282.785.000

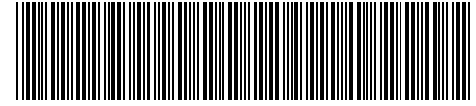
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025**



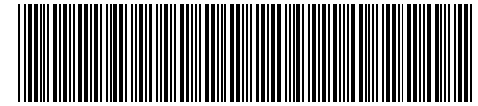
DS:4011-2000-0385-6706

Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

---

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	10.239.240.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	10.239.240.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.043.545.000
WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp.	2.043.545.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (21) MALUKU  
Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Halaman : I A. 1

Program	: 063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	10.239.240.000
Kegiatan	: 3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10.239.240.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 2. 01	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	
	: 3. 01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 4. 01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	
	: 5. 01	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 6. 01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 7. 02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 8. 02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 9. 02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	
	: 10. 02	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	
	: 11. 02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 12. 03	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	
	: 13. 03	Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 14. 03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 15. 03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 16. 04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 17. 04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 18. 04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 19. 05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	
	: 20. 05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 21. 06	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 22. 07	Persentase UMKM yang memenuhi standar	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (21) MALUKU  
Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3165.AEA	Koordinasi	14,00	kegiatan	48.450.000
Rincian Output		:	01	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14,00	kegiatan	48.450.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	14.000.000
Rincian Output		:	01	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1,00	dokumen	14.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	104,00	Orang	71.969.000
Rincian Output		:	01	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	104,00	Orang	71.969.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3165.BKB	Pemantauan produk	1,00	laporan	257.000.000
Rincian Output		:	01	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	laporan	257.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3165.BMB	Komunikasi Publik	25,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	41.767.000
Rincian Output		:	01	BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25,00	kegiatan	41.767.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	6,00	Paket, Unit	50.000.000
Rincian Output		:	01	CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,00	Unit	50.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7,00	Unit	80.000.000
Rincian Output		:	01	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	7,00	Unit	80.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



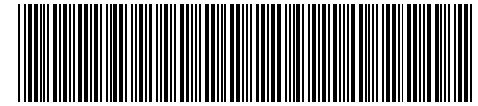
DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (21) MALUKU  
Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	8	:	3165.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan		1,00	Unit	8.496.733.000
Rincian Output		:	01 CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		1,00	Unit	8.496.733.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	3165.PDD	Standarisasi Lembaga		1,00	Lembaga, Unit Kerja	124.107.000
Rincian Output		:	01 PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	(PN)	1,00	Lembaga	124.107.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha		1,00	Perkara, Berkas Perkara	155.356.000
Rincian Output		:	01 QCD.U49	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	(PN)	1,00	Perkara	155.356.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		4,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	330.536.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	(PN)	2,00	Lembaga	93.292.000
		:	02 QDB.002	Desa Pangan Aman	(PN)	1,00	Lembaga	144.017.000
		:	03 QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	(PN)	1,00	Lembaga	93.227.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	3165.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		1,00	UMKM	12.500.000
Rincian Output		:	01 QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	(PN)	1,00	UMKM	12.500.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		257,00	Produk, Laporan, Keputusan	191.532.000
Rincian Output		:	01 QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	(PN)	149,00	Produk	88.300.000
		:	02 QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	(PN)	108,00	Produk	103.232.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (21) MALUKU  
Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Halaman : I A. 4

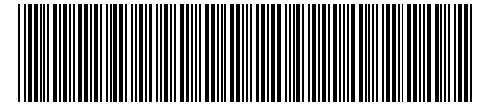
Klasifikasi Rincian Output	14	:	3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	275,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	365.290.000
Rincian Output	:		01	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (PN)	4,00	Lembaga	10.011.000
			02	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (PN)	271,00	Lembaga	355.279.000
Program	:		063.01.WA	Program Dukungan Manajemen			2.043.545.000
Kegiatan	:		6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			2.043.545.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		1. 01	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum			
			2. 01	Nilai Pengawasan Kearsipan			
			3. 02	indeks Pengelolaan Aset BPOM			
			4. 03	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.043.545.000
Rincian Output	:		01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	8.000.000
			02	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	2.035.545.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



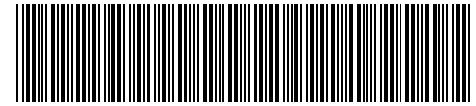
DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (21) MALUKU  
Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672854	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	1.014.545	2.641.507	8.626.733	-	-	12.282.785		
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	1.612.507	8.626.733	-	-	10.239.240		
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	1.612.507	8.626.733	-	-	10.239.240		
3165.AEA	Koordinasi (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	48.450	-	-	-	48.450	21 . 03	
01	RM	-	48.450	-	-	-	48.450	104@	
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	14.000	-	-	-	14.000	21 . 03	
01	RM	-	14.000	-	-	-	14.000	104@	
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	71.969	-	-	-	71.969	21 . 03	
01	RM	-	71.969	-	-	-	71.969	104@	
3165.BKB	Pemantauan produk (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	257.000	-	-	-	257.000	21 . 03	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



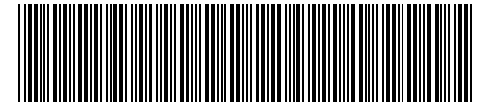
DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (21) MALUKU  
Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	257.000	-	-	-	257.000	104@	
3165.BMB	Komunikasi Publik (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	41.767	-	-	-	41.767	21 . 03	
01 RM		-	41.767	-	-	-	41.767	104@	
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	-	50.000	-	-	50.000	21 . 03	
01 RM		-	-	50.000	-	-	50.000	104	
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	-	80.000	-	-	80.000	21 . 03	
01 RM		-	-	80.000	-	-	80.000	104	
3165.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	-	8.496.733	-	-	8.496.733	21 . 03	
01 RM		-	-	8.496.733	-	-	8.496.733	104	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



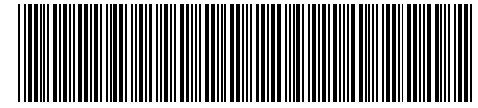
DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (21) MALUKU  
Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3165.PDD	Standarisasi Lembaga (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	124.107	-	-	-	124.107	21 . 03	
01	RM	-	124.107	-	-	-	124.107	104@	
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	155.356	-	-	-	155.356	21 . 03	
01	RM	-	155.356	-	-	-	155.356	104@	
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	330.536	-	-	-	330.536	21 . 03	
01	RM	-	330.536	-	-	-	330.536	104@	
3165.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	12.500	-	-	-	12.500	21 . 03	
01	RM	-	12.500	-	-	-	12.500	104@	
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	191.532	-	-	-	191.532	21 . 03	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (21) MALUKU  
Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
Kewenangan : (KD)

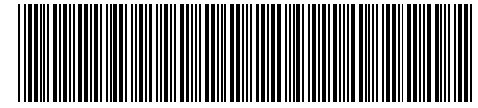
Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	191.532	-	-	-	191.532	104@	
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	-	365.290	-	-	-	365.290	21 . 03	
01 RM		-	365.290	-	-	-	365.290	104@	
<b>063.01.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>1.014.545</b>	<b>1.029.000</b>	-	-	-	<b>2.043.545</b>		
<b>6384</b>	<b>Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM</b>	<b>1.014.545</b>	<b>1.029.000</b>	-	-	-	<b>2.043.545</b>		
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (21.03 MALUKU / KAB. KEPULAUAN TANIMBAR)	1.014.545	1.029.000	-	-	-	2.043.545	21 . 03	
01 RM		1.014.545	1.029.000	-	-	-	2.043.545	104@	
<b>JUMLAH</b>		<b>1.014.545</b>	<b>2.641.507</b>	<b>8.626.733</b>	-	-	<b>12.282.785</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : (21) MALUKU  
Kode>Nama Satker : (672854) LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	672854	<b>LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	527.916	222.634	253.144	1.213.085	200.307	307.001	440.629	326.382	345.447	338.341	217.811	7.890.087	12.282.785
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	96.138	70.297	101.287	103.964	67.737	133.330	68.351	68.214	68.071	62.156	62.156	112.841	1.014.545
		<b>BELANJA BARANG</b>	431.778	152.336	151.857	109.121	132.570	173.671	372.278	258.168	277.376	276.185	155.655	150.513	2.641.507
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.626.733	8.626.733
	063.01.DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6.062	120.114	122.323	1.065.506	109.420	146.387	140.186	219.730	233.763	232.024	115.983	7.727.743	10.239.240
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	6.062	120.114	122.323	65.506	109.420	146.387	140.186	219.730	233.763	232.024	115.983	101.010	1.612.507
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.626.733	8.626.733
	063.01.WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	521.854	102.520	130.821	147.579	90.887	160.614	300.443	106.652	111.684	106.317	101.829	162.344	2.043.545
		51 BELANJA PEGAWAI	96.138	70.297	101.287	103.964	67.737	133.330	68.351	68.214	68.071	62.156	62.156	112.841	1.014.545
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	425.716	32.222	29.534	43.615	23.150	27.283	232.091	38.438	43.613	44.161	39.672	49.503	1.029.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [21] MALUKU  
Kode dan Nama Satker : [672854] LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>672854</b>	<b>LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR</b>	<b>3165.BDC</b>	<b>Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat</b>
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 666.716	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	52 Belanja Barang Rp. 666.716		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.053
<b>063.01.DR</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
<b>3165</b>	<b>Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>3165.AEA</b>	<b>Koordinasi</b>	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.631
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.655		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	<b>3165.BKB</b>	<b>Pemantauan produk</b>
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 765		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.540
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.005		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.135
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>3165.BAH</b>	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.505
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.350		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	<b>3165.BMB</b>	<b>Komunikasi Publik</b>
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.050		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.550
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.610

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
IV A. B L O K I R**



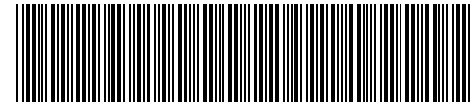
DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [21] MALUKU  
Kode dan Nama Satker : [672854] LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3165.PDD	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3165.QDG	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.439
	<b>Standarisasi Lembaga</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.054		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
3165.QCD	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3165.QIA	<b>Fasilitasi dan Pembinaan UMKM</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.251
	<b>Perkara Hukum Badan Usaha</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.474		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
3165.QDB	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3165.QIC	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.545
	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.796		<b>Pengawasan dan Pengendalian Produk</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.455
3165.QDB	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3165.QIC	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.796		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.100
3165.QDB	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3165.QIC	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.796		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.756
3165.QDB	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3165.QIC	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.796		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 78.730

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [21] MALUKU  
Kode dan Nama Satker : [672854] LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

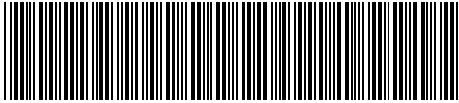
Halaman : IV.A. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>063.01.WA</b> <b>6384</b> <b>6384.EBA</b>	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.890 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.480 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	<b>Program Dukungan Manajemen</b> <b>Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM</b>		
	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.492 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 765 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.325 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 063.01.2.672854/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:4011-2000-0385-6706

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Provinsi : [21] MALUKU  
Kode dan Nama Satker : [672854] LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503